



Penyerapan APBD Kurang Maksimal

JOGJA—Molornya lelang proyek menjadi penyebab serapan anggaran di pemerintah daerah kurang maksimal.

*Triyo Handoko, Jumali, & Stefani Yulindriani
redaksi@harianjogja.com*

Meski demikian, pemerintah daerah di DIY optimistis serapan anggaran hingga akhir tahun ini akan maksimal. Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) Jogja 2023 baru terserap 68,47%. Penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran itu karena molornya sejumlah lelang proyek serta perubahan APBD 2023 yang baru terealisasi pada Oktober lalu.

- ▶ Pemkot Jogja sudah menyiapkan strategi agar hingga tutup buku nanti tercapai keterserapan hingga 90%.
- ▶ Di Kabupaten Bantul, hingga pertengahan November 2023 penyerapan anggaran cukup tinggi.

Kendati begitu, Pemkot Jogja sudah menyiapkan strategi agar hingga tutup buku nanti keterserapan anggaran mencapai 90%.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja pun optimistis. "Sudah kami berikan langkah-langkah secara detail dengan penetapan-penetapan tanggal khusus

agar ditaati seluruh kepala OPD," kata Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Jogja, Dwi Lestari Setyaningsih, Selasa (14/11).

▶ Halaman 10

Penyerapan APBD...

Setiap OPD diminta merampungkan agenda tak rutin pada November ini. "Agenda tak rutin seperti bimtek, pelatihan, dan semacamnya sudah kami minta dilakukan November agar Desember tidak ada lagi," jelasnya.

Adapun agenda rutin, jelas Dwi, seperti pembayaran tenaga kebersihan, keamanan, serta tenaga *outsourcing* lain harus segera diajukan. "Koordinasi juga sudah kami lakukan saat anggaran perubahan kemarin disahkan, artinya langkah-langkah yang ada sudah dilakukan dengan baik oleh tiap OPD," ujarnya.

BPKAD Jogja, jelas Dwi, juga selalu terbuka kepada seluruh OPD di lingkungannya apabila membutuhkan konsultasi. Berkaca dari penyerapan 2022, lanjut Dwi, target 90% cukup realistis. "Pada 2022 kondisinya kurang lebih juga seperti ini, kami optimistis hingga akhir nanti bisa mencapai keteserapan sekitar 90 persen," katanya.

Di Kabupaten Bantul, hingga pertengahan November 2023 penyerapan anggaran cukup tinggi. "Dilihat dari serapan belanja hingga 14 November [2023] sudah 87,05 persen. Tetapi itu dari anggaran murni, dari anggaran perubahan belum dihitung," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Trisna Manurung.

Menurut Trisna, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bantul telah mencapai 83,91%.

Ia menyampaikan saat ini beberapa pekerjaan tengah

dalam proses pelaksanaan sehingga realisasi anggaran tersebut masih dalam proses.

Menurut dia, berdasarkan regulasi baru, proyek yang masih dalam proses dibayarkan setelah pekerjaan selesai, atau dapat diajukan uang muka di awal pekerjaan. Kondisi itu menyebabkan beberapa pekerjaan belum tercatat dalam realisasi anggaran Kabupaten Bantul.

Ia berharap pada November 2023 pekerjaan tersebut telah rampung, sehingga pembayaran pekerjaan tersebut dapat segera dilakukan. "Karena alasan regulasinya saja, apalagi perubahan [APBD Perubahan] 2023 ini baru berlangsung," ujarnya.

Ia optimistis realisasi anggaran akan sesuai dengan target APBD Kabupaten Bantul 2023.

"Harapannya Desember semuanya sudah mengajukan pencairan atau penyerapan anggaran. Paling lambat nanti minggu ketiga Desember [2023] semua sudah mengajukan pembayaran, artinya pekerjaan sudah selesai," katanya.

Efektif Sebulan

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan serapan anggaran jelang tutup tahun 2023 telah mencapai 85%-hingga 95%. Dengan sisa waktu efektif sebulan, Pemkab Sleman optimistis serapan anggaran yang ada akan semakin meningkat.

Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan berdasarkan hasil rapat yang digelar beberapa waktu lalu, tidak ada kendala

dalam realisasi anggaran di Bumi Sembada. "Serapannya 85 sampai 95 persen. Masih ada waktu satu bulan. Kami optimistis bisa meningkatkan serapannya. Semua sudah berjalan," kata Danang.

Menurut Danang, sejauh ini tidak ada kendala dan masalah berarti terkait dengan penyerapan anggaran di Sleman. Jika pun ada, kendala lebih ke teknis.

Danang mencontohkan untuk serapan di infrastruktur, kendala yang sempat ada adalah persyaratan dari rekanan yang belum bisa terpenuhi. "Kemarin kalurahan-kalurahan ini tidak punya sertifikat untuk jadi PPK [Pejabat Pembuat Komitmen]. Dan, tentunya nanti kami evaluasi," jelasnya.

Sementara berdasarkan laman simon.slemankab.go.id, hingga Oktober 2023 dari anggaran Rp3,278 triliun, realisasi keuangan telah mencapai Rp2,354 triliun. Jika dipersentase, realisasi keuangan telah mencapai 71% dan realisasi fisik telah mencapai 78%.

Berdasarkan sebaran per SKPD, realisasi keuangan di bawah 75% ada Dinas Pendidikan (73%), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (69%), Satpol PP (73%), BPBD (72%), Dinas Sosial (59%), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (73%), DLH (49%), Dinas Perhubungan (64%), Dinas Koperasi dan UKM (71%), Dinas Pariwisata (73%), Sekretariat Daerah (70%), Sekretariat DPRD (68%), Inspektorat (68%), dan Badan Kesbangpol (26%).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005